

KOORDINASI MEDIA SEBAGAI STAKEHOLDER DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR ROB PANTURA MELALUI SALURAN KOMUNIKASI

Zulfikar Ikrom^{1*}, Ocha Trisepta Rachmadiani², Noor Hudha³, Atala Aminia Gunawan⁴, Almira Shabrina⁵

¹ Telkom University

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari 2024

Revised Januari 2024

Accepted Januari 2024

Available online Januari 2024

Kata Kunci : Banjir Rob Pantura, Komunikasi, Media, Mitigasi, Stakeholder

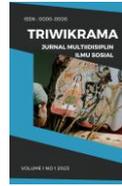


This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

ABSTRAK

Bencana banjir rob di wilayah Pantura merupakan ancaman serius yang memerlukan respons yang efektif dan terkoordinasi dari berbagai pihak terlibat, termasuk media sebagai salah satu stakeholder kunci. Penelitian ini fokus pada peran dan koordinasi media dalam mitigasi bencana banjir rob Pantura melalui saluran komunikasi. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana koordinasi media sebagai stakeholder dapat meningkatkan efektivitas upaya mitigasi bencana. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola koordinasi media dan dampaknya pada upaya mitigasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi media memainkan peran kunci dalam menyampaikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait. Saluran komunikasi yang efektif, seperti siaran langsung, pemberitaan daring, dan media sosial, menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan koordinasi antarstakeholder. Dengan adanya koordinasi media yang baik, upaya mitigasi bencana dapat dilaksanakan dengan lebih efisien, termasuk evakuasi dini, pendistribusian bantuan, dan peringatan dini. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang peran vital media sebagai stakeholder dalam mitigasi bencana banjir rob. Rekomendasi dari penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan untuk meningkatkan kerjasama antara media, pemerintah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana serupa di masa depan.

Kata Kunci : Banjir Rob Pantura, Komunikasi, Media, Mitigasi, Stakeholder



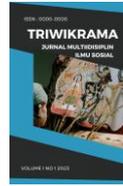
ABSTRACT

The tidal flood disaster in the Pantura region is a serious threat that requires an effective and coordinated response from various parties involved, including the media as one of the key stakeholders. This research focuses on the role and coordination of the media in mitigating the Pantura tidal flood disaster through communication channels. The main aim of this research is to analyze the extent to which media coordination as stakeholders can increase the effectiveness of disaster mitigation efforts. The research method used uses descriptive qualitative methods. The collected data is then analyzed to identify media coordination patterns and their impact on mitigation efforts. The research results show that media coordination plays a key role in conveying accurate and timely information to the public, government, and related institutions. Effective communication channels, such as live broadcasts, online news, and social media, are important instruments in increasing public awareness and coordination between stakeholders. With good media coordination, disaster mitigation efforts, including early evacuation, aid distribution, and early warning, can be implemented more efficiently. This research contributes to a further understanding of the vital role of the media as stakeholders in tidal flood disaster mitigation. The recommendations from this research can be used as a basis for increasing cooperation between the media, government, and society in dealing with similar disasters in the future.

Keywords : Flood Rob Pantura, Communication, Media, Mitigation, Stakeholders

PENDAHULUAN

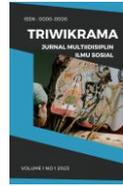
Bencana banjir rob merupakan ancaman serius bagi daerah pesisir, khususnya di Pantura Jawa Tengah. Fenomena ini tidak hanya merugikan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat (Iskandar et al., 2020). Dalam menghadapi tantangan ini, koordinasi media sebagai salah satu *stakeholder* utama memiliki peran krusial dalam upaya mitigasi. Peran media sebagai penyalur informasi dan komunikasi dapat membentuk persepsi masyarakat, memberikan peringatan dini, dan memobilisasi bantuan. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas peran koordinasi media sebagai *stakeholder* dalam mitigasi bencana banjir



rob di Pantura Jawa Tengah melalui saluran komunikasi. Dampak dengan adanya banjir rob di beberapa titik wilayah Pantura (Pantai Utara) Jawa Tengah yaitu seperti Kota Pekalongan, Semarang dan Demak (Rahmanti et al., 2021).

Sejalan dengan meningkatnya ancaman bencana banjir rob, beberapa penelitian sebelumnya telah menginvestigasi peran media dalam mitigasi bencana. Penelitian oleh Zamrodah (2020) menunjukkan bahwa koordinasi media yang efektif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan respons cepat terhadap peringatan dini. Begitu pula, penelitian oleh Egaputra et al., (2022) menyatakan bahwa media memiliki peran kunci dalam merancang strategi mitigasi bencana yang efektif. Namun, kendati banyak penelitian yang menggarisbawahi pentingnya peran media dalam mitigasi bencana, belum ada penelitian yang secara khusus membahas koordinasi media sebagai *stakeholder* utama dalam mengatasi bencana banjir rob di Pantura Jawa Tengah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan literatur ini dan memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana koordinasi media dapat ditingkatkan untuk memitigasi dampak bencana banjir rob (Miftakhudin, 2021).

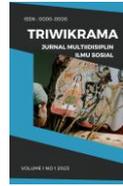
Kebaharuan dalam penelitian ini terletak pada fokus yang spesifik pada koordinasi media sebagai *stakeholder* dalam konteks mitigasi bencana banjir rob di Pantura Jawa Tengah. Melalui pendekatan ini, penelitian ini akan membawa kontribusi unik terhadap literatur yang sudah ada dan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana media dapat berperan lebih efektif dalam upaya mitigasi bencana (Izza, 2019). Penelitian ini juga akan membedah peran saluran komunikasi yang digunakan oleh media dalam menyampaikan informasi terkait bencana banjir rob. Dengan melalui media cetak, media online, atau media sosial, setiap saluran komunikasi memiliki dampak dan jangkauan yang berbeda. Pemahaman lebih lanjut tentang preferensi dan keefektifan masing-masing saluran



komunikasi dapat membantu merancang strategi komunikasi yang lebih terarah (Isnaini, 2021).

Dalam menghadapi bencana banjir rob, koordinasi media menjadi krusial karena mereka bukan hanya penyampai informasi tetapi juga pemain kunci dalam membentuk persepsi dan sikap masyarakat. Koordinasi media sebagai *stakeholder* memerlukan sinergi antara berbagai entitas media, pemerintah, LSM, dan masyarakat untuk mencapai tujuan mitigasi yang optimal. Beberapa penelitian sebelumnya mencatat bahwa kurangnya koordinasi antara media dan pemerintah dapat menghambat respons yang efektif terhadap bencana (El-Fath et al., 2022). Penelitian ini akan mendalami ke dalam strategi dan mekanisme koordinasi yang dapat meningkatkan respons cepat dan efektif dalam mitigasi bencana banjir rob di Pantura Jawa Tengah. Dengan memahami dinamika kerja koordinasi media, diharapkan dapat tercipta kerjasama yang lebih baik antar-*stakeholder*, membentuk saluran komunikasi yang efisien, dan meningkatkan kesiapan serta resiliensi masyarakat terhadap bencana (Salim & Siswanto, 2021).

Setiap saluran komunikasi memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Media cetak, meskipun masih penting, mungkin tidak secepat media online atau media sosial dalam menyampaikan informasi peringatan dini. Oleh karena itu, penelitian ini akan merinci kontribusi masing-masing saluran komunikasi dalam meningkatkan efektivitas mitigasi bencana banjir rob (Adi & Wahyudi, 2022). Dengan adanya *agenda setting* melalui media sosial dapat lebih efektif dalam merespon kebutuhan masyarakat secara cepat, atau apakah media cetak tetap memegang peran penting dalam memberikan informasi rinci dan mendalam (Yuniarti et al., 2018). Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi interaksi antara saluran komunikasi yang berbeda dan bagaimana integrasi mereka dapat memperkuat sistem peringatan dini dan koordinasi respons. Dengan memahami kompleksitas dinamika

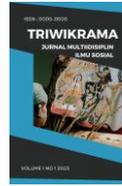


antar saluran komunikasi, penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang bagaimana mengoptimalkan saluran komunikasi untuk mencapai tujuan mitigasi bencana (Izharsyah et al., 2020).

Pantura Jawa Tengah memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang unik. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis tantangan khusus yang dihadapi oleh koordinasi media dalam mengatasi bencana banjir rob di daerah ini. Mungkin ada kendala logistik, perbedaan budaya, atau keterbatasan teknologi yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi media sebagai *stakeholder* dalam mitigasi bencana.

Dengan memahami tantangan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang tepat sasaran untuk meningkatkan ketahanan dan kesiapan masyarakat Pantura Jawa Tengah dalam menghadapi bencana banjir rob (Setiawan et al., 2021).

Dalam konteks mitigasi bencana banjir rob di Pantura Jawa Tengah, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan literatur melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang peran koordinasi media sebagai *stakeholder* utama. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam upaya meningkatkan kesiapan dan resiliensi masyarakat terhadap bencana banjir rob. Dengan menggali lebih dalam peran media, mengidentifikasi keunikannya dalam konteks lokal, dan merinci strategi koordinasi yang efektif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang bagaimana mengoptimalkan koordinasi media sebagai bagian integral dari upaya mitigasi bencana (Fariza & Handayani, 2022). Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan dan praktik terbaik dalam menghadapi bencana banjir rob, tidak hanya di Pantura Jawa Tengah tetapi juga di daerah-daerah pesisir lainnya.



METODE

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam peran koordinasi media sebagai *stakeholder* dalam mitigasi bencana banjir rob di Pantura Jawa Tengah melalui saluran komunikasi. Penelitian kualitatif dirancang untuk mendapatkan pemahaman yang holistik dan kontekstual terhadap fenomena yang diteliti (Adlini et al., 2022). Penelitian ini akan berfokus pada Pantura Jawa Tengah, dengan penekanan pada daerah-daerah yang rawan terkena dampak banjir rob. Pemilihan daerah penelitian didasarkan pada tingkat kerentanan dan frekuensi kejadian bencana, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang representatif tentang peran koordinasi media dalam mitigasi bencana. Data akan dikumpulkan dari artikel jurnal, buku, laporan pemerintah, dan sumber literatur lainnya untuk memahami kerangka konseptual, teori, dan temuan terkait topik penelitian. Analisis literatur ini akan membantu merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih mendalam dan membangun dasar untuk pemahaman konteks penelitian.

Observasi langsung dilakukan di daerah penelitian untuk memperoleh pemahaman langsung tentang kondisi lapangan dan dinamika sosial masyarakat terkait mitigasi bencana. Tim peneliti akan melakukan kunjungan ke lokasi-lokasi yang memiliki risiko tinggi terhadap banjir rob. Observasi akan mencakup pemahaman tentang infrastruktur, tata ruang, sistem peringatan dini yang ada, dan partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan media lokal, petugas mitigasi bencana, pejabat pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. Wawancara ini akan difokuskan untuk mendapatkan insight tentang peran media dalam mitigasi bencana, hambatan yang dihadapi, dan potensi perbaikan yang dapat dilakukan. Data yang diperoleh dari literatur, observasi, dan wawancara akan dianalisis secara kualitatif.



Analisis data kualitatif akan melibatkan pengelompokan temuan-temuan yang muncul, identifikasi pola, dan penyusunan narasi deskriptif. Pendekatan ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran koordinasi media dalam mitigasi bencana banjir rob. Melalui kombinasi metode *literatur review* dan observasi lapangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran koordinasi media dalam mitigasi bencana banjir rob di Pantura Jawa Tengah. Pendekatan kualitatif deskriptif ini dapat memberikan wawasan yang mendalam untuk membantu merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual dan efektif (Permanahadi & Widowati, 2022).

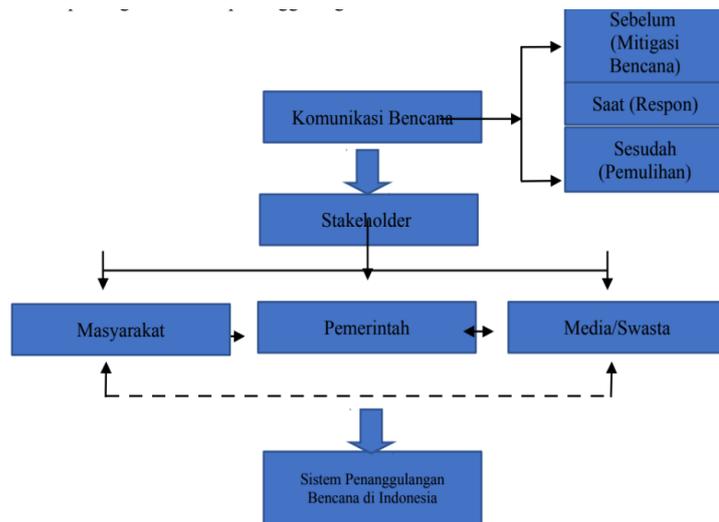
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Saluran Komunikasi dan Proses *Stakeholder*

Berdasarkan hasil wawancara serta data observatif yang telah peneliti peroleh. Berbagai bentuk komunikasi tentang bencana dengan pemerintah, termasuk dengan media dan masyarakat umum, dapat mengurangi risiko bencana dan mengakui nyawa serta dampak yang ditimbulkan oleh bencana yang dimaksud. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana Penanggulangan yang menetapkan paradigma bahwa penanggulangan bencana hanya harus memperhitungkan situasi pada saat terjadinya bencana (tanggapan darurat) dan peringatan risiko bencana. Sebelum terjadinya bencana (*disaster mitigasi*), saat terjadi bencana (*reaction*), dan setelah terjadi bencana (*recovery*). Proses penanggulangan bencana di Indonesia melibatkan sejumlah pihak, antara lain pemerintah, masyarakat, media, dan sektor komersial (Sauda et al., 2019).

Menurut Uman (2019), model komunikasi bencana terdapat dibagi menjadi beberapa bagian. Peran utama dalam model komunikasi bencana adalah adanya penyampaian dari pihak komunikasi bencana dalam menyampaikan kegiatan pada

sebelum terjadinya bencana (*disaster mitigasi*), saat terjadi bencana (*reaction*), dan setelah terjadi bencana (*recovery*). Penyampaian dalam bentuk komunikasi bencana akan dilakukan oleh *stakeholder* atau seseorang ataupun sekelompok yang memiliki kepentingan dalam organisasi tertentu (pemerintah). *Stakeholder* tersebut dapat berupa masyarakat, pemerintah, dan media/swasta. Nantinya, *stakeholder* inilah yang berperan penting dalam membantu mengkomunikasikan bencana kepada khalayak sekitar (Suyadi et al., 2020).

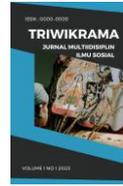


Gambar 3.1

Model Komunikasi Bencana

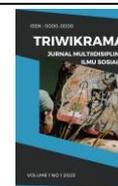
(Sumber : Data Olahan Peneliti)

Pada proses *stakeholder* dalam pihak masyarakat, pemerintah, dan media/swasta memiliki peranan masing-masing dalam mengkoordinasi tanggung jawab dalam mitigasi bencana. Pihak pemerintah dalam menyelenggarakan lembaga atau pihak-pihak yang dibutuhkan untuk masyarakat adalah kewajiban dan tanggung jawab mutlak. Pemerintah memiliki lembaga atau pihak secara struktural dari tingkatan tertinggi (pusat) hingga tingkatan terendah (desa/kelurahan). Setiap bagian dari pemerintah harus memiliki kesiapan yang tinggi untuk menangani



bencana. Peranan penting dalam proses koordinasi dan manajemen komunikasi bencana dapat ditinjau dengan adanya pembuatan rencana kontingensi, pengorganisasian oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) ataupun lembaga pemerintahan lainnya. Dalam pelaksanaan lembaga tersebut serta mengevaluasi kinerja ditetapkan koordinasi secara rutin antar pihak-pihak tersebut sehingga dengan semakin baiknya manajemen komunikasi ini akan meningkatkan kesiapsiagaan di seluruh elemen pemerintah (Fariza & Handayani, 2022). Di wilayah yang menjadi fokus penelitian, yaitu Kota Pekalongan, Kota Semarang, dan Kabupaten Demak di Jawa Tengah, terdapat fenomena banjir rob yang menjadi perhatian utama. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengindikasikan bahwa ketiga wilayah ini rentan terhadap bencana banjir rob. Informasi tersebut didukung oleh data dari Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) yang menempatkan Provinsi Jawa Tengah dalam posisi rawan yang signifikan (Iskandar et al., 2020).

Pada tingkat regional provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Pekalongan, Kota Semarang, dan Kabupaten Demak memiliki sejumlah titik rawan bencana banjir rob yang memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, pemerintah daerah di wilayah ini, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), memiliki peran yang krusial dalam kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Pemetaan titik rawan melalui peta wilayah menjadi upaya nyata untuk meningkatkan pemahaman terhadap risiko bencana di masyarakat. Selain lembaga pemerintah, masyarakat di wilayah tersebut juga terlibat aktif dalam upaya kesiapsiagaan bencana. Berbagai bentuk komunitas seperti kelompok keluarga, kelompok pemuda, dan komunitas Peduli Bencana (PB), Aksi Cepat Tanggap (ACT), serta Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) telah



terbentuk. Proses ini mencakup peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai bencana, dengan memberikan pembekalan pengetahuan terkait ciri utama tsunami dan banjir. Terutama, masyarakat di wilayah pesisir Demak, yaitu Kecamatan Sayung, yang dahulu sebetulnya letak wilayahnya jauh dari bibir pantai sehingga di masa sekarang ini masyarakat Sayung, Demak telah mendapatkan pemahaman yang cukup terkait kesiapsiagaan bencana (Haloho & Purnaweni, 2020).

Koordinasi antara pemerintah dan masyarakat sebagai *stakeholder* diarahkan tidak hanya pada sosialisasi mitigasi bencana, tetapi juga sebagai sarana komunikasi yang mempermudah respons dan penanganan bencana. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan penyebaran informasi bertujuan agar mereka dapat bertindak dengan tepat saat terjadi bencana. Hal ini menjadi penting karena pemberitaan oleh media tidak selalu dapat diandalkan sepenuhnya, dan terkadang informasi yang beredar di masyarakat kurang tepat. Pihak media dan swasta juga memegang peran kunci dalam proses kesiapsiagaan bencana. Melalui berita yang disiarkan, baik melalui media elektronik maupun cetak, informasi mengenai bencana disampaikan kepada khalayak luas. Media memiliki tanggung jawab untuk menyajikan fakta secara akurat. Namun, ada tantangan ketika informasi yang disebarkan oleh media belum sepenuhnya tervalidasi oleh pemerintah, seperti kasus bencana banjir rob tahun 2023 di Kota Pekalongan. Masyarakat kadang lebih mempercayai informasi dari media sosial dibandingkan informasi resmi dari pemerintah (Miftakhudin, 2021).

Meskipun demikian, media juga dapat terlibat langsung ke lokasi kejadian untuk memberikan informasi langsung dari penyintas kepada pemerintah atau masyarakat luas. Ini menciptakan saluran komunikasi yang langsung dan memungkinkan media untuk memainkan peran penting dalam proses mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Dalam konteks ini, koordinasi antara pemerintah,

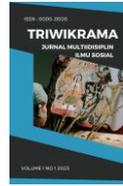


masyarakat, dan media menjadi esensial (Miftakhudin, 2021). Sinergi di antara ketiga *stakeholder* ini akan memperkuat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di wilayah yang rentan terhadap banjir rob, seperti Kota Pekalongan, Kota Semarang, dan Kabupaten Demak di Jawa Tengah.

Keterlibatan Media sebagai *Stakeholder* dalam Mitigasi Bencana

Media massa merupakan salah satu dari berbagai jenis komunikasi yang terjadi di masyarakat. Adapun konsep media itu sendiri berarti proses di mana organisasi media menciptakan berita dan menyebarkannya ke masyarakat umum, dan di mana proses pesan dicari, digunakan, dan dikonsumsi oleh lapisan masyarakat umum (Iskandar et al., 2020). Sampai saat ini, media massa masih menjadi sumber utama informasi masyarakat mengenai bencana. Oleh sebab itu, media diharuskan memberi informasi yang terpercaya dan terverifikasi untuk disebarkan kepada masyarakat, terutama informasi pra-bencana. Media memiliki tugas memberikan informasi mengenai pencegahan bencana. Informasi mengenai bencana ini diharapkan bisa memberikan sikap reaktif dari masyarakat untuk bisa mencegah terjadinya bencana (El-Fath et al., 2022).

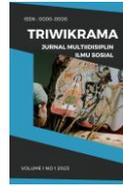
Media massa memiliki kekuatan untuk menggiring opini dan perilaku masyarakat. Media bukan sebuah sistem yang memaksa masyarakat untuk memikirkan hal yang sama seperti apa yang disampaikan media, tetapi media bisa menggiring dan membujuk masyarakat untuk berpikir. Fenomena ini disebut sebagai *agenda building*. Oleh karena kekuatan media yang seperti inilah, media disebut sebagai aktor non-negara (Setiawan et al., 2021). Kekuatan ini membuat peranan media dalam mitigasi bencana menjadi sangat penting, karena media dapat membuat masyarakat lebih mengenal fenomena bencana secara jelas. Hal ini membuat masyarakat bisa lebih waspada karena paham dengan bencana yang mungkin akan terjadi. Sudut pandang media dalam menginformasikan berita dapat menggiring



sudut pandang masyarakat terhadap bencana. Sebagaimana yang disampaikan oleh Egaputra et al., (2022), ia menyampaikan bahwa media sejauh ini berkecenderungan menggiring masyarakat untuk melihat belum optimalnya penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Selanjutnya menurut Egaputra et al., (2022) media memiliki peran lain yang lebih dari menginformasikan bencana dari sudut pandang mereka. Media juga berperan sebagai pemberi wacana lain, contohnya mengenai bagaimana bisa bertahan di kondisi bencana. Hal ini diharapkan bisa membangun kemandirian dari penyintas bencana. Namun saat ini, terkadang media tidak memberikan informasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga media juga sebenarnya perlu belajar banyak mengenai bencana, manajemen informasi bencana, dan bagaimana mendistribusikan informasi tersebut. Dengan begitu, informasi yang tersebar di masyarakat adalah benar-benar informasi yang dibutuhkan dan bisa bermanfaat.

Media bekerja dengan meneruskan informasi yang telah dipastikan validitasnya. Kemampuan media dalam menyalurkan berbagai pesan informasi terkait bencana kepada khalayak dapat mengurangi kepanikan, menyelamatkan nyawa dan dampak dari bencana tersebut (Zamrodah, 2020). Koordinasi yang dilakukan media adalah dapat terjun secara langsung lokasi bencana ataupun dapat berupa informasi melalui penyintas dan komunitas masyarakat. Lalu, dari informasi tersebut dapat divalidasi kembali dan menyesuaikan komunikasi dengan pemerintah. Dengan begitu, informasi yang disiarkan menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, media juga dapat bekerja secara mitigasi dengan cara menampilkan dan bekerjasama dengan lembaga tertentu untuk menunjukkan data statistik daerah yang rawan bencana. Sehingga, dapat memudahkan khalayak sekitar untuk berjaga-jaga dan dapat terkoordinir dengan baik.



Hubungan Media Dengan Aktor Formal Dan Non Formal Dalam Mitigasi Bencana

Saat ini, media massa menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat ketika merujuk pada berita terkait bencana. Oleh karena itu, penting bagi media untuk menyajikan informasi yang aktual dan terverifikasi seputar bencana, mulai dari sebelum bencana terjadi, saat bencana berlangsung, hingga setelah bencana berlalu. Sebuah contoh nyata adalah dalam pemberitaan terkait gempa di suatu daerah, di mana informasi sebelum terjadinya gempa memiliki nilai penting yang signifikan. Kerjasama kolaboratif dalam menghadapi bencana alam, khususnya tsunami, memberikan dukungan sumberdaya dari masyarakat dan sektor swasta, meningkatkan partisipasi keduanya, menggali aspirasi masyarakat, membangun kepercayaan publik kepada pemerintah, serta meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik (Ilyas, 2020). Media juga diminta untuk memberikan panduan terkait perencanaan dalam menghadapi bencana. Data mengenai bencana yang disampaikan kepada masyarakat serta upaya menyampaikan informasi bencana menunjukkan respon reaktif media terhadap bencana. Media massa memiliki peran penting dalam memperkenalkan dan menyampaikan data mengenai bencana sebagai insiden yang membutuhkan respons bersama dari masyarakat, baik secara lokal maupun nasional (Egaputra et al., 2022).

Bencana sering terjadi di Indonesia, dimana terjadinya bencana sering disebabkan oleh interaksi antara kerentanan, ancaman, dan ketidakmampuan dalam mengurangi akibat atau resiko. Kerentanan masyarakat mencerminkan kurangnya kapasitas untuk mengantisipasi, menangani, dan memulihkan diri dari dampak ancaman. Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kapasitas ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang karakteristik bahaya bencana. Akibatnya, ketika bencana terjadi, masyarakat tidak siap untuk menghadapinya. Aktor-aktor yang terlibat, baik dalam lingkup formal maupun non-formal, saat terjadi



bencana, menjadi poin penting dalam rencana revisi UU Penanggulangan Bencana. Hal ini diperlukan sebagai respons atas urgensi serta solusi pasca Pandemi Covid-19 dan perubahan sosial, ekonomi, dan politik lainnya (Setiawan et al., 2021).

Dalam konteks formal, pada saat terjadi gempa, terlibatlah BNPB yang perlu membentuk satuan kerja di daerah untuk menyederhanakan proses birokrasi. BPBD juga membutuhkan pemimpin yang bukan pelaksana. Selain itu, penting untuk menghilangkan unsur pengarah dari BNPB dan BPBD, serta memastikan bahwa Kepala BNPB dan BPBD dapat dijabat oleh PNS, Prajurit TNI, atau Anggota Polri. BNPB dan BPBD juga perlu mampu mengerahkan serta melibatkan Prajurit TNI dan Anggota Polri dalam kegiatan penanggulangan bencana, terutama dalam situasi darurat. Dalam lingkup non-formal manajemen bencana, menjadi komponen pendukung dalam mengurangi dampak bencana di Indonesia. Dibagi menjadi lembaga Internasional dan Nasional, lembaga-lembaga internasional seperti PBB, Negara Lain (NL), Lembaga Internasional (LI), Internasional (I), Masyarakat Internasional (MI), dan Lembaga Asing Non Pemerintah, memberikan kontribusi dalam mengurangi dampak bencana (Pahleviannur, 2019).

Peran dan Pola Komunikasi dalam Koordinasi Media Untuk Mengupayakan Mitigasi Bencana Dalam Studi Kasus Yang Terjadi Di Indonesia

Indonesia merupakan wilayah rawan bencana jika dilihat dari geografisnya. BNPB mengunggah peta sebaran wilayah yang rawan bencana di Indonesia sebagai berikut :

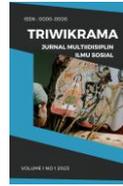


Gambar 3.2

Peta sebaran daerah rawan bencana di Indonesia

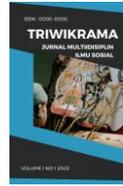
(Sumber : Laman BNPB)

Gambar 3.2 memberikan visualisasi potensi bencana di Indonesia. Bagian yang berwarna merah menunjukkan daerah dengan potensi rawan bencana yang tinggi. Daerah dengan potensi rawan bencana yang tinggi, membuat perlu adanya penguatan organisasi di daerah tersebut dalam menghadapi bencana. Potensi bencana yang tinggi juga berdampak pada sektor pariwisata. Banyak wisatawan yang enggan berkunjung ke Indonesia dikarenakan hal tersebut (Sauda et al., 2019). Sehingga dalam konteks Indonesia yang merupakan daerah rawan bencana, koordinasi media dalam upaya mitigasi bencana merupakan hal yang dibutuhkan pada era media massa saat ini. Media Massa mampu memberikan rumor yang tidak jelas dan disisi lain media massa juga mampu untuk menghentikan rumor yang tidak jelas tersebut. Media massa memegang peranan penting dalam masyarakat dalam memberikan informasi khususnya informasi mengenai kebencanaan yang sebenarnya terjadi di Indonesia. Perolehan informasi oleh masyarakat mengurangi kepanikan karena bencana yang terjadi (Rahmanti et al., 2021).



Menurut penelitian Apriadi et al., (2020) yang membahas *Agenda Setting* Media Massa, media massa merupakan alat yang efektif untuk menyebarkan informasi secara luas dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Media massa bukan hanya menjadi sarana untuk memberikan informasi, tapi juga hiburan yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Peran media massa tidak hanya menentukan cara penyebaran informasi, tetapi juga dapat memengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Dalam konteks peran media saat terjadi bencana, Yusuf dalam Bintang et al., (2018) menyatakan bahwa media sering kali memberikan liputan duka cita terhadap bencana, namun dalam hal yang sama juga menampilkan berita sukacita yang kurang empati. Sebagai contoh, saat media secara berangsur-angsur menampilkan liputan bencana seperti tsunami dan gempa bumi di Indonesia terletak di Lampung dan Banten pada tahun 22 Desember 2018, pada saat yang sama juga menyajikan berita perayaan Natal dan tahun baru. Media juga berperan sebagai sistem peringatan dini dalam mitigasi bencana alam. Media massa menjadi saluran komunikasi yang efektif untuk menyebarkan informasi yang akurat secara tepat waktu kepada masyarakat. Kemitraan dengan media membutuhkan pemahaman yang baik terhadap kebutuhan media dan melibatkan staf yang terlatih untuk menyampaikan informasi kepada publik (Iduwin, 2019).

Dengan begitu, pada pola komunikasi pihak masyarakat, pemerintah dan media memiliki peranan yang sangat penting dalam mitigasi. Seperti pemaparan sebelumnya bahwa pola komunikasi terjadi adalah dengan munculnya komunikasi bencana yang dikarenakan adanya mitigasi ataupun kejadian tertentu lain (sebelum atau saat kejadian) akan disalurkan pada *stakeholder*. *Stakeholder* dalam pihak mitigasi studi kasus tersebut adalah masyarakat, pemerintah dan media. Di mana, pihak masyarakat berkontribusi dalam mitigasi dengan menjalankan sosialisasi secara langsung dan pemantauan sosial media serta informasi yang diterima dari



pemerintah. Pihak pemerintah berkontribusi dalam mitigasi dengan cara memberikan edaran informasi melalui lembaga-lembaga resmi seperti yang disebutkan sebelumnya dalam studi kasus yaitu BPBD Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, pihak media juga berperan sangat penting dengan menyebarkan informasi melalui media cetak maupun elektronik kepada khalayak masyarakat. Jika dilihat dalam studi kasus maka media sosial lah yang menjadi peran penting dalam penyampaian informasi (Rahmanti et al., 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, tentu peneliti mencoba menggarisbawahi kesimpulan tentang peran penting koordinasi media sebagai salah satu pemangku kepentingan kunci dalam menghadapi tantangan mitigasi bencana banjir rob di wilayah Pantura. Dalam kerangka ini, peran saluran komunikasi menjadi sangat vital untuk memfasilitasi koordinasi yang efektif antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, LSM, masyarakat, dan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika media berfungsi dengan efektif sebagai *stakeholder*, mereka mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko banjir rob, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, serta turut berperan dalam pengorganisasian dan mobilisasi sumber daya untuk mitigasi dan penanggulangan bencana. Saran penelitian melibatkan fokus pada pengembangan protokol komunikasi yang lebih efektif antara media dan pihak-pihak terkait. Protokol ini perlu didesain untuk memastikan aliran informasi yang cepat dan akurat serta meningkatkan koordinasi di antara berbagai instansi terkait. Peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi praktisi media dan pemangku kepentingan lainnya juga diusulkan, dengan tujuan memperkuat kemampuan mereka dalam mengidentifikasi pesan-pesan kunci, merespons keadaan darurat, dan memahami peran masing-masing dalam upaya mitigasi bencana. Selanjutnya, saran untuk peneliti selanjutnya tentu bisa



mengeksplorasi potensi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung koordinasi media dalam mitigasi bencana. Penggunaan platform media sosial, sistem peringatan dini berbasis teknologi, dan aplikasi mobile dapat dianalisis lebih lanjut untuk mempercepat penyebaran informasi. Dalam konteks keterlibatan masyarakat, penelitian dapat lebih mendalam pada upaya meningkatkan partisipasi masyarakat melalui media, sehingga mereka dapat lebih aktif dalam rangkaian upaya mitigasi. Terakhir, evaluasi kontinu terhadap kinerja media sebagai *stakeholder* dalam konteks bencana dapat memberikan pandangan mendalam tentang keberhasilan dan kelemahan, yang pada gilirannya dapat memberikan dasar untuk perbaikan berkelanjutan dalam manajemen bencana di masa depan. Harapannya, implementasi saran-saran ini dapat meningkatkan efektivitas koordinasi media sebagai bagian integral dalam mitigasi bencana banjir rob, tidak hanya di wilayah Pantura tetapi juga di wilayah-wilayah lainnya yang mungkin menghadapi tantangan serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, H. P., & Wahyudi, S. I. (2022). Edukasi Partisipasi Masyarakat Kelurahan Pandean Lamper dalam Pemeliharaan Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur Semarang. *Indonesian Journal of Community Services*, 4(1), 41. <https://doi.org/10.30659/ijocs.4.1.41-48>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Apriadi, T., Muzammil, W., Melani, W. R., & Safitri, A. (2020). Struktur komunitas makrozoobenthos di aliran sungai di Senggarang, Pulau Bintan, Kepulauan Riau. *Depik*, 9(1), 119–130. <https://doi.org/10.13170/depik.9.1.14641>
- Bintang, R. A. K. N., Umar, R., & Yudhana, U. (2018). Perancangan perbandingan live



forensics pada keamanan media sosial Instagram, Facebook dan Twitter di Windows 10. *Prosiding SNST Ke-9 Tahun 2018 Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim*, 125–128.

Egaputra, A. A., Ismunarti, D. H., & Pranowo, W. S. (2022). Inventarisasi Kejadian Banjir Rob Kota Semarang Periode 2012 –2020. *Indonesian Journal of Oceanography*, 4(2), 29–40. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ijoce>

El-Fath, D. D. I., Atmodjo, W., Helmi, M., Widada, S., & Rochaddi, B. (2022). Analisis Spasial Area Genangan Banjir Rob Setelah Pembangunan Tanggul di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. *Indonesian Journal of Oceanography*, 4(1), 96–110. <https://doi.org/10.14710/ijoce.v4i1.13254>

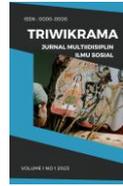
Fariza, A., & Handayani, B. L. (2022). Tindakan Struktural Mitigasi Bencana Pemerintah Di Indonesia. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(2), 288–305. <https://doi.org/10.20961/jas.v11i2.57282>

Haloho, E. H., & Purnaweni, H. (2020). Adaptasi masyarakat Desa Bedono terhadap banjir rob di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(4), 150–158. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/28997>

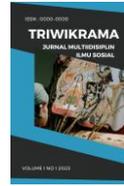
Iduwin, T. (2019). Edukasi Evakuasi Gempa Bumi Sebagai Mitigasi Bencana Di Smk Ad-Da'Wah. *Terang*, 1(1), 51–59. <https://doi.org/10.33322/terang.v1i1.62>

Ilyas, I. (2020). Revitalisasi Peran Srategis Sekretaris Daerah Dalam Mengakselerasi Reformasi Birokrasi. *Kalabbirang Law Journal*, 2(2), 162–181. <https://doi.org/10.35877/454ri.kalabbirang146>

Iskandar, S. A., Helmi, M., Muslim, M., Widada, S., & Rochaddi, B. (2020). Analisis Geospasial Area Genangan Banjir Rob dan Dampaknya pada Penggunaan Lahan



-
- Tahun 2020 - 2025 di Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. *Indonesian Journal of Oceanography*, 2(3), 271–282. <https://doi.org/10.14710/ijoce.v2i3.8668>
- Isnaini, M. (2021). Produksi Dance Film “Spectrumotion Banjir Rob” Dalam Peristiwa Banjir Di Sayung Demak. *Jurnal Seni Makalangan*, 19, 9–15. <https://jurnal.isbi.ac.id/index.php/makalangan/article/view/2012>
- Izharsyah, J. R., Lubis, F. H., & Hardiyanto, S. (2020). Penguatan Pengabdian Dalam Penerapan Mitigasi Bencana Tanah Longsor Dan Banjir Di Nagori Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. *JURNAL PRODIKMAS Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4, 64–68. <https://doi.org/10.30596/jp.v4i2.6324>
- Izza, M. (2019). Mitigasi Banjir ROB Perspektif Ecopreneur Muslim. *Al-Buhuts*, 15(1), 89–107. <https://doi.org/10.30603/ab.v15i1.973>
- K, F. A., & Uman, C. (2019). Komunikasi Bencana Sebagai Sebuah Sistem Penanganan Bencana Di Indonesia. *Mediakom: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 25–37. <https://doi.org/10.35760/mkm.2019.v3i1.1980>
- Miftakhudin, S. (2021). Strategi Penanganan Banjir Rob Kota Pekalongan. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 20(1), 29–38. <https://doi.org/10.54911/litbang.v20i1.142>
- Pahleviannur, M. R. (2019). Edukasi Sadar Bencana Melalui Sosialisasi Kebencanaan Sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan Siswa Terhadap Mitigasi Bencana. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 29(1), 49–55. <https://doi.org/10.23917/jpis.v29i1.8203>
- Permanahadi, A., & Widowati, E. (2022). Mitigasi bencana banjir di kota semarang. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 6(2), 225–235. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia>
- Rahmanti, A., Anugrah Tegar L, Dita Ayu R, Damayanti A, Inka Nur S, & Nadya Lailita P. (2021). Bhakti Sosial Penanggulangan Banjir Di Kelurahan Trimulyo



Kecamatan Genuk Kota Semarang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sisthana*, 3(1), 08–12. <https://doi.org/10.55606/pkmsisthana.v3i1.36>

Salim, M. A., & Siswanto, A. B. (2021). Kajian Penanganan Dampak Banjir Kabupaten Pekalongan. *Rang Teknik Journal*, 4(2), 295–303. <https://doi.org/10.31869/rtj.v4i2.2525>

Sauda, R. H., INugraha, A. L., & Hani'ah. (2019). Kajian Pemetaan Kerentanan Banjir Rob di Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Geodesi Undip*, 8(1), 466–474.

Setiawan, A., Saputra, H. A., & Atmojo, M. E. (2021). Efektifitas Penyebaran Informasi Covid-19 Melalui Media Twitter Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. *Jurnal Academia Praja*, 4(1), 89–106. <https://doi.org/10.36859/jap.v4i1.210>

Suyadi, Nuryana, Z., & Fauzi, N. A. F. (2020). The fiqh of disaster: The mitigation of Covid-19 in the perspective of Islamic education-neuroscience. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 51, 101848. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2020.101848>

Yuniarti, T., Saleh, A., Hubeis, M., & Kinseng, R. (2018). Perspektif Media Online Terhadap Kasus Pembangunan Permukiman di Kota Bekasi menggunakan Pendekatan Model Agenda Setting. *Journal Pekommas*, 3(2), 179–190.

Zamrodah, Y. (2020). *Efektivitas Penerapan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Di Kota Malang Provinsi Jawa Timur*. 15(2), 1–23.